

ANALISIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PERBANDINGAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU)

Oleh
Shara Anjani
Nim. 2105040040

Abstrak

Perzinahan merupakan perbuatan yang dipandang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena berkaitan erat dengan nilai moral, agama, dan kesusilaan, serta berpotensi mengganggu keutuhan keluarga. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait karakter delik aduan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai arah pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap perlindungan nilai moral serta penghormatan terhadap ranah privat individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan delik aduan dalam tindak pidana perzinahan antara KUHP lama dan KUHP baru, serta menelaah arah kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama mengatur perzinahan sebagai delik aduan absolut dengan ruang lingkup terbatas pada pelaku yang terikat perkawinan dan hak pengaduan yang hanya dimiliki oleh pasangan sah. Sementara itu, KUHP baru memperluas cakupan perbuatan perzinahan serta pihak yang berhak mengajukan pengaduan, sehingga mencerminkan pergeseran kebijakan hukum pidana menuju perlindungan nilai kesusilaan dan keharmonisan keluarga yang lebih luas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan delik aduan perzinahan dalam KUHP baru tetap mempertahankan mekanisme pengaduan sebagai pembatas intervensi negara, namun dengan orientasi yang lebih kuat pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan kepentingan keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Delik Aduan, Perzinahan, KUHP Lama, KUHP Baru.

**ANALYSIS OF COMPLAINT-BASED OFFENSES IN THE CRIME OF
ADULTERY (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE OLD CRIMINAL
CODE AND THE NEW CRIMINAL CODE)**

By
Shara Anjani
Nim. 2105040040

Abstract

Adultery is considered a sensitive act in Indonesian society because it is closely related to moral, religious, and decency values and has the potential to disrupt family integrity. The regulation of the crime of adultery in Indonesian criminal law has undergone significant changes following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), particularly with regard to the character of complaint-based offenses previously regulated under Article 284 of the old Criminal Code. These changes have sparked debates concerning the direction of criminal law reform and its implications for the protection of moral values and respect for the private sphere of individuals. This study aims to analyze and compare the regulation of complaint-based offenses in the crime of adultery under the old Criminal Code and the new Criminal Code, as well as to examine the direction of national criminal law reform. This research employs a normative legal research method using conceptual and comparative approaches, based on statutory regulations, criminal law doctrines, and relevant legal literature. The findings indicate that the old Criminal Code classifies adultery as an absolute complaint-based offense with a limited scope, applying only to married individuals and granting the right to file a complaint exclusively to the lawful spouse. Meanwhile, the new Criminal Code expands both the scope of adulterous conduct and the parties entitled to submit complaints, reflecting a shift in criminal law policy toward broader protection of moral values and family harmony. This study concludes that the reform of adultery-related complaint-based offenses in the new Criminal Code continues to maintain the complaint mechanism as a limitation on state intervention, while placing stronger emphasis on religious values, Pancasila, and family interests within Indonesian society.

Keywords : *Complaint-Based Offense, Adultery, Old Criminal Code, New Criminal Code.*